

Analisa hukum atas perjanjian pengadaan barang antara Bank Indonesia sebagai lembaga negara dengan pihak swasta ditinjau dari hukum perjanjian (Tinjauan kasus perjanjian pengadaan Server Data Warehouse antara Bank Indonesia dengan PT. Multipolar Corporation)

Kenna Herdi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20204707&lokasi=lokal>

Abstrak

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dimulai ketika sebuah Undang undang baru yaitu uu no. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan akan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Dengan adanya UU tersebut maka status Bank Indonesia menjadi badan hukum dengan wewenang mengelola kekayaan tersendiri terlepas dari APBN. Salah satu hal yang menunjang lancarnya pelaksanaan tugas Bank Indonesia adalah dengan tersedianya barang-barang dan peralatan yang cukup. Untuk melengkapi peralatan tersebut maka perlu diadakan pengadaan barang Bank Indonesia. Pembuatan dan pelaksanaan dari perjanjian ini harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum perdata di bidang hukum perjanjian serta pula harus diperhatikan kedudukan kedua belah pihak yang terkait sesuai dengan fungsinya agar tercapai keseimbangan. Permasalahan yang akan saya bahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana prosedur perjanjian pengadaan barang dengan Bank Indonesia selaku Lembaga Negara, bagaimanakah kedudukan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian pengadaan barang ini dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak serta bagaimana bentuk perjanjian pengadaan barang tersebut jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum perdata di bidang hukum perjanjian. Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Dari pembahasan pada skripsi maka diperoleh kesimpulan yaitu Pengadaan Barang pada Bank Indonesia didasarkan pada Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No. 2/16/PDG/2000 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia, dari isi perjanjian memang terlihat terdapat ketidakseimbangan kedudukan para pihak dimana pengaturan yang demikian diadakan mengingat kepentingan umum yang bertujuan memenuhi salah satu tujuan pembangunan yaitu untuk kesejahteraan rakyat dan perjanjian Pengadaan Barang antara Bank Indonesia dengan PT. Multipolar Corporation dilakukan dengan cara jual beli, sehingga salah satu pihak memiliki kewajiban yang merupakan hak-hak dari pihak lainnya dan sebaliknya.